

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Internasionalisasi Taman Kanak Kanak di Indonesia dimulai dengan adanya desentralisasi dan pola kerjasama lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dinilai menjadi suatu inovasi baik karena sekolah internasional menawarkan sistem pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan tantangan global dibandingkan dengan sistem pendidikan yang ada sebelumnya di Indonesia. Kerjasama antar lembaga pendidikan terbentuk dalam pembelian sistem pendidikan dalam bentuk franchise, yang kemudian diterapkan kurikulum dan pembelajaran yang berasal dari negara dimana sekolah franchise utama itu berada. Hal ini berkembang dan bertumbuh subur di Indonesia. Banyak sekolah sekolah franchise dari luar negeri, membuka cabang diberbagai kota di Indonesia.

Hasil wawancara menunjukkan bagaimana kepala sekolah terus melakukan adaptasi dan bernegosiasi dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai pemimpin di lembaga pendidikan. Sekolah franchise, yang menggunakan kurikulum internasional sesuai dari negara asal franchise tersebut, juga mempunyai aturan-aturan kekhususan yang harus diterapkan di mana saja branch (cabang) sekolah itu berada. Untuk yang berkedudukan di Indonesia, berlaku aturan tersebut walaupun juga terikat oleh nomenklatur dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara distrik melalu dinas pendidikan kota. Nomenklatur lokal dari pemerintah Indonesia dan nomenklatur global dari negara asal sekolah franchise menjadi salah satu unsur kompleksitas pengelolaan sekolah franchise di Indonesia.

Peraturan-peraturan di Indonesia yang sering kali berubah-ubah membuat kepala sekolah harus terus beradaptasi untuk dapat mengikutinya, sedangkan perangkat yang harus disiapkan juga tidak sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, sehingga para kepala sekolah harus melakukan serangkaian kegiatan yang harus bisa menjadi solusi. Dalam hal ini diperlukan kompetensi kepala sekolah sebagai kepala lembaga yang baik.

Intani Prajaswari, 2020

NEGOSIASI PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI TAMAN KANAK-KANAK INTERNASIONAL
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemampuan manajerial dalam menjalankan tugasnya sangat dituntut berperforma tinggi dan kemampuan negosiasi juga diperlukan sangat penting untuk dapat berada di ruang tengah nomenklatur franchise dan nomenklatur lokal dalam menjalankan operasional sekolah.

5.2. Implikasi

Berbagai peraturan nomenklatur disusun dan diimplementasikan terkait kriteria dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu dasar atau kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kemudian dipadukan atau ditambahkan kemampuan khusus dalam menjalankan pekerjaannya untuk kepala sekolah sebagai kepala lembaga di sekolah Internasional yang menggunakan sistem franchise.

Karena hasil temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang bentuk ketumpangtindihan antar nomenklatur lokal dan global. Gambaran ini bisa menjadi bahan pemahaman semua pihak bahwa diperlukan peraturan dasar yang mengikat seorang kepala sekolah internasional dalam menjalannya tugasnya baik dalam hal managerial, supervisi, professional, sosial dan kewirausahaan.

Adanya upaya pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat daerah untuk membuat nomenklatur yang memagari kebijakan operasional sekolah internasional tidak dirujuk secara spesifik melalui serangkain kegiatan pengawasan dari pemerintah. Maka kepala sekolah sebagai kepala lembaga di Taman Kanak-Kanak internasional dituntut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan memiliki kemampuan bernegosiasi untuk dapat berada dalam dua ranah nomenklatur, seringkali hal ini dilaksanakan secara mendadak, tanpa pemberitahuan. Hasil temuan menjelaskan betapa kepala sekolah franchise ini harus mempunyai kemampuan elaborasi dengan berbagai pihak, baik internal dengan yayasan dan orangtua siswa, tetapi juga dengan dinas pendidikan dan kantor pusat asal dari sekolah franchise tersebut.

5.3. Rekomendasi

1) Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah dengan sistem franchise (Internasional) perlu meningkatkan kompetensi sebagai kepala lembaga yang memiliki keunikan dalam menjalannya pekerjaannya karena berada di dua nomenklatur yang berbeda. Pelatihan institusional diperlukan untuk menjadi kepala sekolah dengan kriteria ini, karena tidak mungkin kepala sekolah harus menjalankan tugas sehari-harinya dengan dua pola nomenklatur, tetapi diharapkan kepala sekolah mempunyai rencana dan antisipasi tepat dalam menghadapi permasalahan ini. Sertifikasi kepala sekolah juga diperlukan untuk penjaminan terpeliharanya kemampuan kepala sekolah.

2) Bagi Lembaga

Lembaga perlu memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari terutama dalam hal menjaga kode etik dalam bernegosiasi antara nomenklatur global dan lokal, supaya kegiatan operasional sekolah sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan efektif. Lembaga sebagai induk organisasi juga perlu memberikan fasilitas pelatihan baik itu keterampilan, kepemimpinan dan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai kepala sekolah. Dan lembaga harus mempunyai itikad atau kemauan untuk melaksanakan nomenklatur yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan, lembaga tidak hanya berorientasi pada bisnis semata. Lembaga harus berada di jalur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini perlu memastikan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dapat menjangkau kepala sekolah-kepala sekolah dengan sistem franchise, mulai dari ketika suatu lembaga pendidikan mengajukan izin prinsip dan izin operasional ke Dinas Pendidikan setempat, sehingga dari awal, sekolah tersebut mengikut aturan dasar yang ada

dipemerintah, karena kedudukan lembaga tersebut berada di Indonesia, otomatis dipagari oleh nomenklatur dari pemerintah Indonesia.

Tidak hanya pelayanan pelatihan institusional yang diperlukan oleh kepala sekolah dengan sistem franchise, keluwesan pengawas sekolah dalam membimbing kepala sekolah mengerjakan tugasnya sehari-hari juga sangat diperlukan karena akan ada proses negosiasi dalam hal pengerjaan tugas kepala sekolah sehari-hari.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggali terkait strategi kepala sekolah yang tepat untuk menangani keberadaan kepala sekolah di antara dua nomenklatur, juga dapat meneliti proses pemberian izin sekolah franchise oleh pemerintah dan pelaksanaan layanan pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dari pemerintah, khususnya untuk sekolah-sekolah dengan sistem franchise.

